

Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur

Amanda Kusuma Wardani

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email : amanda.22144@mhs.unesa.ac.id

Lucky Rachmawati

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia
Email: luckyrachmawati@unesa.ac.id

Abstrak

Kemiskinan masih menjadi persoalan struktural di Provinsi Jawa Timur yang ditandai oleh perbedaan tingkat kemiskinan antar kabupaten/kota. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan oleh berbagai aspek sosial dan ekonomi yang saling berkaitan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendidikan, upah minimum, dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur selama periode 2022–2024 dengan berlandaskan pada teori *Vicious Circle of Poverty*, yang menjelaskan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya kesempatan kerja, dan rendahnya pendapatan dapat mempertahankan kondisi kemiskinan secara berulang. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel yang menggabungkan 38 kabupaten/kota sebagai data cross-section dan periode 2022–2024 sebagai data time-series. Data bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik dan dianalisis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan upah minimum berpengaruh negatif namun tidak signifikan. Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pendidikan, Upah Minimum, Pengangguran, Jawa Timur.

JEL: I32, I21, J64

Abstract

Poverty remains a structural problem in East Java Province, as reflected in the disparities in poverty rates across regencies and municipalities. This condition indicates that poverty is not driven by a single factor, but rather by interconnected social and economic aspects. This study aims to analyze the effects of education, minimum wage, and unemployment on the poverty rate in East Java during the 2022–2024 period, based on the *Vicious Circle of Poverty* theory, which explains that low human capital quality, limited employment opportunities, and low income levels tend to perpetuate poverty over time. The research employs a quantitative approach using panel data that combine cross-sectional data from 38 regencies/municipalities and time-series data from 2022 to 2024. The data are sourced from official publications of Statistics Indonesia (Badan Pusat Statistik) and are analyzed using panel data regression. The results indicate that education has a negative and significant effect on poverty, unemployment has a positive and significant effect, while the minimum wage has a negative but statistically insignificant effect. Simultaneously, the three variables have a significant effect on the poverty rate in East Java.

How to Cite: Wardani, A. K. & Rachmawati, L. (2026). Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur. *Independent : Journal Of Economics*, 6(2), 192–212.

Keywords: *Poverty, Education, Minimum Wage, Unemployment, East Java.*

JEL: *I32, I21, J64*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat struktural, sehingga upaya pengentasannya menjadi salah satu tantangan penting dalam pembangunan, termasuk di Indonesia. Pada tingkat makro, perekonomian dunia tumbuh lambat, dan bermacam-macam berbagai krisis global telah menghambat upaya untuk mengurangi kemiskinan. Menurut Bank Dunia (2023) mencatat bahwa meskipun banyak negara mengalami pertumbuhan ekonomi positif, ketimpangan distribusi manfaat pertumbuhan membuat sebagian kelompok masyarakat tetap terjebak dalam kondisi miskin (Bank Dunia, 2023). Temuan tersebut menegaskan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi belum cukup efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan secara menyeluruh, sehingga intervensi pada aspek mendasar, termasuk penguatan kualitas SDM, kinerja tenaga kerja, dan perlindungan sosial. Karenanya, pengentasan kemiskinan memerlukan strategi yang komprehensif dan menyeluruh agar tingkat kesejahteraan masyarakat umum dapat meningkat secara berkesinambungan.

(Badan Pusat Statistik, 2023) di Indonesia menunjukkan banyak hal positif pertumbuhan. Tingkat kemiskinan periode Maret 2023 mengalami depresiasi hingga 9,36% dari 9,54% pada periode yang sama tahun sebelumnya (Badan Pusat Statistik, 2023). Penurunan ini mencerminkan perbaikan kondisi ekonomi pasca pandemi. Namun, data ini masih menunjukkan bahwa sekitar 24,9 juta orang hidup dalam kemiskinan. Penurunan tersebut perlu dibahas lebih lanjut karena kondisi ekonomi global, seperti risiko resesi dan tingginya inflasi, dapat memengaruhi perkembangan positif yang telah dicapai.

Dalam konteks yang lebih spesifik, Jawa Timur sebagai provinsi dengan kontribusi terbesar kedua terhadap perekonomian nasional memiliki peran yang sangat penting. Dengan capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45% pada tahun 2022, Jawa Timur melampaui rata-rata nasional (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023). Data BPS 2023 mengindikasikan adanya tren positif dalam pengentasan kemiskinan, yang tercermin dari penurunan persentase penduduk miskin pada Maret 2023 menjadi 10,63% dari 11,05% pada periode yang sama tahun 2022. Capaian ini tidak terlepas dari pemulihan ekonomi pascapandemi yang telah mendorong perbaikan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, angka kemiskinan yang masih berada di atas dua digit mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan masih memerlukan kerja keras dan kebijakan yang lebih terarah.

Kemiskinan dapat dipahami sebagai isu struktural yang kompleks, di mana berbagai faktor berkontribusi secara simultan, di antaranya pendidikan, upah minimum, dan pengangguran. Ketiga faktor tersebut membentuk hubungan yang erat dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan dapat menjelaskan dinamika kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur.

Meskipun berbagai kebijakan ekonomi telah diterapkan oleh pemerintah daerah maupun pusat, tingkat prevalensi kemiskinan penduduk di Provinsi Jawa Timur masih menunjukkan variasi yang signifikan antarwilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan belum sepenuhnya

berjalan merata, sehingga diperlukan analisis empiris yang komprehensif untuk menguji peran pendidikan, upah minimum, dan pengangguran secara simultan, khususnya pada periode pascapandemi tahun 2022–2024.

Pendidikan merupakan instrumen penting dalam penurunan kemiskinan karena berhubungan langsung dengan kualitas sumber daya manusia. Teori modal manusia Becker (1993) menjelaskan bahwa pendidikan sebagai investasi dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan individu dalam jangka panjang. Susanto (2019) menegaskan bahwa rendahnya rata-rata lama sekolah masih menjadi kendala utama dalam memperoleh pekerjaan layak sehingga meningkatkan risiko kemiskinan. Temuan empiris menunjukkan hasil yang beragam, di mana Pradipta (2020) menemukan RLS di Provinsi Banten tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan, sementara Yasir (2024) menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan di Sumatra berkorelasi dengan penurunan kemiskinan. Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi determinan utama dalam meningkatkan peluang kerja dan pendapatan masyarakat jangka panjang.

Upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman bagi pekerja berpenghasilan rendah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga daya beli. Menurut Sari (2021), kebijakan ini penting guna memastikan standar hidup layak di tengah kenaikan biaya hidup, meskipun di beberapa daerah besarnya upah minimum belum sebanding dengan biaya hidup, terutama di wilayah perkotaan. Azizah (2020) menemukan bahwa kenaikan UMP di Jawa Timur dapat menurunkan kemiskinan, namun Utami et al. (2022) menunjukkan dampaknya tidak selalu konsisten karena dipengaruhi kepatuhan perusahaan dan perbedaan biaya hidup antarwilayah. Dengan demikian, efektivitas upah minimum bergantung pada kepatuhan pelaksanaan serta keseimbangan antara upah dan biaya hidup masyarakat.

Pengangguran berkontribusi terhadap peningkatan kemiskinan karena hilangnya pekerjaan melemahkan pendapatan dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Putri dan Putri (2021) menyatakan bahwa pengangguran terbuka meningkatkan risiko sosial ekonomi akibat tidak terserapnya penduduk usia produktif, sedangkan Choirur et al. (2021) menemukan pengaruh positif dan signifikan pengangguran terhadap kemiskinan di Indonesia. Sebaliknya, Widiastuti (2023) menunjukkan bahwa di Jawa Timur pengangguran tidak berpengaruh signifikan karena dominasi sektor informal. Perbedaan hasil ini menegaskan bahwa dampak pengangguran terhadap kemiskinan bersifat kontekstual dan dipengaruhi karakteristik wilayah, periode penelitian, serta struktur pasar tenaga kerja.

Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada skala nasional dan analisis parsial, sementara kajian yang menempatkan Jawa Timur sebagai objek utama relatif terbatas, padahal provinsi ini memiliki peran ekonomi penting dan permasalahan kemiskinan yang kompleks. Selain itu, periode 2022–2024 merupakan fase pemulihan pascapandemi dengan tantangan baru seperti inflasi dan risiko resesi global, sehingga menimbulkan gap penelitian yang relevan. Secara empiris, pendidikan berkaitan dengan peningkatan upah, sebagaimana ditunjukkan Kadir (2019) dengan pengembalian sekitar 4,7% per tambahan satu tahun sekolah. Data BPS Jawa Timur (2023) menunjukkan RLS usia 25 tahun ke

atas sebesar 8,92 tahun, masih di bawah target 12 tahun, HLS sebesar 13,45 tahun, serta adanya disparitas pendidikan antarwilayah dan gender yang relatif kecil. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh pendidikan, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada periode 2022–2024 dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi data panel. Secara akademik, kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dengan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai faktor-faktor ekonomi yang memengaruhi kemiskinan di tingkat regional pascapandemi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih tepat sasaran melalui peningkatan kualitas pendidikan, penetapan upah minimum yang layak, serta perluasan kesempatan kerja, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat Jawa Timur.

METODE PENELITIAN

Kajian ini mengadopsi metode kuantitatif eksplanatori guna mengeksplorasi hubungan kausal antarvariabel sekaligus menilai pengaruh determinan terhadap fenomena yang diamati. Studi ini memanfaatkan data sekunder berbentuk data panel, yaitu gabungan data *cross section* kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan data *time series* periode 2022–2024. Data bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS kabupaten/kota melalui publikasi resmi yang berjudul Jawa Timur dalam Angka dan kabupaten/kota dalam Angka.

Kajian ini dilakukan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang dipilih karena memiliki peran penting dalam perekonomian nasional serta karakteristik sosial ekonomi yang beragam, yang tercermin dari adanya perbedaan tingkat kemiskinan, kondisi pendidikan, upah minimum, dan pengangguran antarwilayah. Periode penelitian 2022–2024 dipilih secara khusus karena mencerminkan fase pemulihan ekonomi setelah pandemi Covid-19, sehingga dapat menggambarkan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat ketika aktivitas ekonomi dan pasar tenaga kerja mulai kembali berjalan setelah mengalami gangguan selama masa pandemi. Tahun 2022 digunakan sebagai titik awal karena merupakan periode awal pemulihan ekonomi pascapandemi, sedangkan tahun 2023 dan 2024 digunakan untuk melihat perkembangan kondisi tersebut pada tahun-tahun berikutnya, termasuk perubahan tingkat pendidikan, upah minimum, pengangguran, dan kemiskinan di masing-masing kabupaten/kota. Pemilihan periode tiga tahun juga disesuaikan dengan ketersediaan data yang konsisten dan dapat diperbandingkan pada 38 kabupaten/kota yang bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik, sehingga diperoleh 114 observasi dalam bentuk data panel. Dengan demikian, periode 2022–2024 tidak dipilih secara sembarang, tetapi ditujukan untuk menangkap dinamika kemiskinan dan faktor-faktor yang memengaruhinya pada fase pemulihan ekonomi pascapandemi di Jawa Timur, sekaligus memberikan gambaran mengenai kondisi antarwilayah selama periode tersebut.

Definisi Operasional Variabel

Pada studi ini, peneliti mengidentifikasi satu variabel dependen, yaitu Kemiskinan (Y) dan tiga variabel independen, yaitu Pendidikan (X_1), Upah Minimum (X_2), dan Pengangguran (X_3). Penjelasan masing-masing variabel yaitu:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Satuan
Kemiskinan (Y)	Kemiskinan dalam penelitian ini diukur berdasarkan persentase penduduk miskin, yaitu proporsi penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS.	Persen (%)
Pendidikan (X_1)	Pendidikan menggambarkan kualitas sumber daya manusia yang diukur melalui RataRata Lama Sekolah (RLS), yaitu rata-rata jumlah tahun pendidikan yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas.	Tahun
Upah Minimum (X_2)	Upah minimum merupakan besaran upah minimum yang berlaku di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.	Rupiah /Tahun
Pengangguran (X_3)	Proporsi penduduk usia kerja (≥ 15 tahun) yang tidak bekerja, sedang mencari pekerjaan, atau mempersiapkan usaha baru terhadap total angkatan kerja, diukur dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).	Persen (%)

Teknik Pengumpulan Data

Penghimpunan data studi ini dilakukan dengan metode dokumentasi atau data sekunder yang sudah ada dan dipublikasikan oleh pihak resmi. Kajian ini memanfaatkan data panel, yaitu kombinasi data cross-section dan time series, untuk periode 2022–2024 yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Timur serta BPS kabupaten/kota. Data ini memiliki validitas dan konsistensi yang tinggi, dan sering dibuat rujukan dalam penelitian sosial dan ekonomi di Indonesia.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel untuk menangkap variasi antarwilayah dan antarwaktu secara simultan. Secara umum, hubungan antarvariabel dirumuskan dalam model regresi panel sebagai berikut:

$$\text{KEMISKINAN}_{it} = a + b_1 \text{RLS}_{it} + b_2 \text{UMK}_{it} + b_3 \text{TPT}_{it} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Pemilihan Model Regresi Panel

Gujarati (2003:559–603) mengemukakan bahwa estimasi regresi data panel melalui Pooled Least Squares (PLS), Fixed Effect Method (FEM), dan Random Effect Method (REM).

Metode PLS mengkombinasikan data *time series* dan *cross section* serta mengestimasi model menggunakan teknik OLS.

Metode FEM memperhitungkan adanya variabel tidak teramati yang dapat menyebabkan perbedaan intersep antarwaktu atau antarunit penampang, sehingga model memasukkan variabel dummy untuk menangkap perbedaan tersebut

Random Effect Model (REM) digunakan sebagai teknik estimasi data panel yang mengakomodasi perbedaan antar individu serta perubahan sepanjang periode

waktu. Perbedaan ini tercermin melalui intercept yang menyesuaikan error, sementara model ini juga memperhitungkan korelasi kesalahan antara cross-section dan time series.

Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Uji Chow

Tahapan yang dilaksanakan untuk menentukan pilihan antara model regresi kuadrat terkecil terpadu dan model efek tetap dalam suatu studi. Hipotesis yang diuji dalam Chow test adalah:

H_0 : Pooled Least Square

H_1 : Fixed Effect Model

Jika p -value uji $F < 0,05$, H_0 ditolak dan model efek tetap dipilih; jika p -value $> 0,05$, H_0 tidak ditolak dan model kuadrat terkecil gabungan diterapkan.

Uji Hausman

Diterapkan guna menilai kesesuaian penggunaan model FEM atau REM. Hipotesis dasar dari uji ini menyatakan bahwa

H_0 = model REM

H_1 = model FEM

Jika p -value $< \alpha$ (1%, 5%, atau 10%), maka H_0 ditolak dan dipilih model FEM. Sebaliknya, jika p -value $> \alpha$, maka H_0 diterima dan model REM diterapkan untuk mengestimasi data panel.

Uji Asumsi Klasik

Gujarati dan Porter (2009) menyatakan bahwa suatu model regresi sah apabila memenuhi asumsi dasar, termasuk kebebasan dari gangguan. Asumsi ini harus dipenuhi agar estimasi regresi menjadi BLUE, yang berarti estimasi yang diberikan akurat, efisien, dan tidak bias. Pelanggaran terhadap salah satu asumsi ini dapat menyebabkan kesimpulan yang salah dalam analisis regresi. Inilah mengapa pengujian asumsi klasik diperlukan sebelum menarik kesimpulan.

Dalam studi ini, pengujian asumsi klasik dalam studi ini dilakukan setelah pemilihan model regresi data panel yang sesuai, yaitu melalui perbandingan CEM, FEM, dan REM. Meskipun dalam praktiknya, data panel biasanya menunjukkan heteroskedastisitas dan autokorelasi, kami akan menerapkan langkah koreksi, seperti kesalahan standar yang robust (koreksi White cross-section atau Driscoll-Kraay), untuk menjaga validitas estimasi.

Uji Normalitas

Uji ini diperlukan untuk memeriksa normalitas distribusi residual. Apabila residual berdistribusi normal, maka model regresi dinilai memiliki validitas yang memadai untuk dilakukan pengujian statistik lanjutan. Sebagaimana dikemukakan dalam Gujarati dan Porter (2009), hasil uji t dan uji F bisa menjadi tidak valid jika menghadapi masalah penyimpangan distribusi normal. Untuk penelitian ini, normalitas menggunakan uji Jarque-Bera (JB Test) yang dibantu dengan software EViews. Kriteria pengujian JB mengandalkan nilai probabilitas (p -value) dan diambil keputusan jika p -value $> \alpha = 0,05$, residual berdistribusi normal, sementara jika p -value $< 0,05$, residual tidak berdistribusi normal dan bisa dilanjutkan dengan transformasi data dan uji normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi hubungan linear yang terlalu kuat antarvariabel. Seperti yang dinyatakan Gujarati dan Porter (2009), Islam, adanya multikolinearitas yang kuat menyebabkan ketidakstabilan output koefisien regresi dan menyulitkan interpretasi analitik. Misalnya, perubahan kecil dalam data mentah yang mendasarinya akan mengakibatkan perubahan drastis dalam hasil estimator. Kajian ini mengevaluasi variabel pendidikan, upah minimum, dan pengangguran secara bersamaan guna memverifikasi bahwa tidak ada multikolinearitas yang signifikan di antara ketiga variabel tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas menentukan apakah varians dari term error (residu) konstan di seluruh observasi. Varians residu yang berbeda di setiap observasi disebut sebagai heteroskedastisitas. Ini dapat menyebabkan model regresi menjadi tidak efisien, meskipun tetap konsisten (Gujarati & Porter, 2009). Dalam kajian ini, pengujian heteroskedastisitas White karena uji ini tidak memerlukan asumsi residu terdistribusi normal serta dapat mengidentifikasi berbagai bentuk heteroskedastisitas. Menurut ketentuan pengujian, bila nilai probabilitas $\text{Obs} \cdot R\text{-kuadrat} > 0,05$, model dapat dianggap bebas dari heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika tidak, penambahan kesalahan standar yang robust akan diperlukan untuk menjaga keandalan estimasi.

Goodness of Fit

Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Dimanfaatkan guna menguji signifikansi pengaruh parsial antar variabel, dengan hipotesis:

$H_0 : \beta_1 = 0$ berarti tidak ada korelasi parsial antar variabel, sedangkan $H_1 : \beta_1 \neq 0$ menunjukkan adanya korelasi parsial.

H_0 ditolak jika $p\text{-value} < \alpha$, yang mengindikasikan pengaruh signifikan variabel independen terhadap dependen. Pengujian juga dapat dilakukan melalui perbandingan t-statistik dan t-tabel; t-statistik $>$ t-tabel berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F diterapkan untuk mengevaluasi pengaruh simultan antar variabel. Secara umum, hipotesis yang diuji:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$

$H_1 : \text{Namun, salah satu koefisien } (\beta) \neq 0$

Hipotesis ini dapat diuji menggunakan nilai probabilitas (P-value), yang diperoleh dengan membandingkan P-value (*critical value*) tabel F. Jika $p\text{-value} < F\text{-tabel}$, H_0 ditolak, dan variabel independen terbukti menjelaskan variabel dependen secara signifikan.

Koefisien Determinasi (R^2)

R^2 menunjukkan berapa persen perubahan variabel terikat yang dapat diterangkan oleh seluruh variabel bebas, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar model penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data

Tahap analisis deskriptif bertujuan untuk menggambarkan profil subjek penelitian sekaligus menyediakan informasi awal terkait distribusi dan pola data, dengan ringkasan hasil pada tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Deskriptif Data Variabel Kemiskinan (Y)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kemiskinan	114	3,060,000	2,176,000	1,013,518	4,241,468
Valid N (listwise)	114				

Sumber : Data diolah Eviews 13 (2026)

Hasil statistik deskriptif variabel kemiskinan menunjukkan bahwa dari 114 observasi, Nilai minimum sebesar 3,060,000 dan maksimum sebesar 2,176,000 menunjukkan adanya perbedaan tingkat kemiskinan antarwilayah. Nilai rata-rata (mean) sebesar 1,013,518 menggambarkan tingkat kemiskinan rata-rata di Jawa Timur selama periode penelitian, sedangkan standar deviasi sebesar 4,241,468 menunjukkan variasi kemiskinan yang cukup besar antar daerah, sehingga menegaskan bahwa masalah kemiskinan di Jawa Timur tidak merata dan kompleks.

Tabel 3. Hasil Deskriptif Data Variabel Pendidikan (X1)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendidikan	114	5,060,000	1,211,000	8,382,301	1,650,454
Valid N (listwise)	114				

Sumber : Data diolah Eviews 13 (2026)

Hasil statistik deskriptif variabel pendidikan menunjukkan bahwa dari 114 observasi, nilai minimum sebesar 5,060,000 dan nilai maksimum sebesar 1,211,000, yang mencerminkan adanya perbedaan tingkat pendidikan antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Nilai rata-rata (mean) sebesar 8,382,301 menggambarkan tingkat pendidikan rata-rata masyarakat selama periode penelitian, sedangkan standar deviasi sebesar 1,650,454 menunjukkan adanya variasi pendidikan antarwilayah, meskipun tidak setinggi variasi kemiskinan. Hal ini menegaskan bahwa kualitas pendidikan di Jawa Timur belum merata antar daerah.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif variabel upah minimum menunjukkan bahwa dari 114 observasi, nilai minimum sebesar 1,922,123 dan nilai maksimum sebesar 4,725,479, yang menandakan adanya perbedaan tingkat upah minimum antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Nilai rata-rata (mean) sebesar 2,668,773 menggambarkan besaran upah minimum rata-rata selama periode penelitian,

sedangkan standar deviasi sebesar 803.424,5 menunjukkan adanya variasi upah minimum antarwilayah. Hal ini menegaskan bahwa kebijakan upah minimum di Jawa Timur belum seragam dan masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masing-masing daerah.

(Hasil lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1).

Hasil statistik deskriptif variabel pengangguran menunjukkan bahwa dari 114 observasi, nilai minimum sebesar 1,360,000 dan nilai maksimum sebesar 8,800,000, yang menunjukkan adanya perbedaan tingkat pengangguran antar kabupaten/kota di Jawa Timur. Nilai rata-rata (mean) sebesar 4,687,965 menggambarkan tingkat pengangguran rata-rata selama periode penelitian, sedangkan standar deviasi sebesar 1,528,063 menunjukkan variasi pengangguran yang cukup besar antarwilayah. Hal ini menegaskan bahwa masalah pengangguran di Jawa Timur masih bersifat tidak merata dan menjadi faktor penting dalam dinamika kemiskinan daerah.

(Hasil lengkap dapat dilihat pada Lampiran 2).

Hasil Uji Persyaratan Analisis

Pengujian ini bertujuan menilai kelayakan model regresi panel. Pemilihan model melalui Uji Chow (CEM vs FEM) dan Uji Hausman (FEM vs REM) menghasilkan model yang paling konsisten dan efisien untuk menganalisis pengaruh pendidikan, upah minimum, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Timur.

Uji Chow

Uji Chow dilakukan untuk menentukan model yang paling tepat antara Common Effect Model (CEM) dan Fixed Effect Model (FEM). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas Cross-section F sebesar $0,0000 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, model yang lebih tepat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) dibandingkan Common Effect Model (CEM).

(Hasil output Uji Chow dapat dilihat pada Lampiran 3)

Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model (REM). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai probabilitas sebesar $0,0045 < 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Dengan demikian, model yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model (FEM).

(Hasil output Uji Hausman dapat dilihat pada Lampiran 4)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan uji Jarque-Bera, nilai statistik 4,501823 dengan *p-value* 0,105303 $> 0,05$, Hal ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut.

(Hasil output Uji Normalitas dapat dilihat pada Lampiran 5)

Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan guna memastikan tidak adanya keterkaitan tinggi antarvariabel independen, sehingga model regresi memenuhi asumsi non-multikolinearitas dan menghasilkan estimasi yang andal. Berdasarkan analisis matriks korelasi di antara

variabel independen bahwa nilai korelasi untuk X1 (pendidikan) dan X2 (upah minimum) adalah 0,416; X1 (pengangguran) dan X3 (pengangguran) adalah 0,498; dan X2 (upah minimum) dan X3 (pengangguran) adalah 0,406. Namun, karena korelasi antarvariabel independen $< 0,90$, model regresi tidak menunjukkan adanya multikolinearitas yang serius

(Hasil output Uji Normalitas dapat dilihat pada Lampiran 6)

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode White, nilai probabilitas (*Prob.*) untuk variabel X1, X2, dan X3 adalah 0,8297; 0,2484; dan 0,3465. P-value seluruh pengujian $> \alpha = 0,05$, sehingga model regresi bebas dari heteroskedastisitas dan varians error konstan, menunjukkan pemenuhan asumsi klasik regresi.

Uji Hipotesis

(Hasil output Uji Hipotesis dapat dilihat pada Lampiran)

Hasil model FEM digunakan untuk menyusun persamaan regresi data panel berikut:

$$\text{KEMISKINAN}_{it} = 4,152292_{it} - 0,95285X1_{it} - 0,00894X2_{it} + 0,14156X3_{it} \quad (2)$$

Dijabarkan berikut ini:

Dengan nilai konstanta positif sebesar 4,152292, diasumsikan bahwa jika variabel pendidikan (X1), upah minimum (X2), dan pengangguran (X3) tidak berpengaruh atau bernilai nol, tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama 2022–2024 diproyeksikan sebesar 4,152292 persen.

Koefisien pendidikan (X1) $-0,95285$ mengindikasikan bahwa setiap tambahan satu tahun pendidikan menurunkan kemiskinan sebesar 0,95285 persen, dengan variabel lain tetap. Temuan ini menunjukkan peran penting pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi kemiskinan.

Koefisien upah minimum (X2) sebesar $-0,00894$ menunjukkan bahwa setiap kenaikan upah minimum sebesar Rp1 akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,00894 persen, dengan asumsi variabel pendidikan dan pengangguran tetap. Dengan demikian, kenaikan upah minimum sebesar Rp100.000 akan berkaitan dengan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,894 persen. Namun, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik karena nilai probabilitas sebesar 0,9272 lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen.

Koefisien pengangguran (X3) 0,14156 positif, yang berarti kenaikan 1 persen pada pengangguran meningkatkan kemiskinan sebesar 0,14156 persen, dengan variabel lain tetap. Hasil ini menunjukkan pengangguran meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap kemiskinan.

Uji T

Uji *t* dilakukan untuk menilai pengaruh parsial variabel independen terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur (2022–2024), di mana variabel dianggap signifikan jika *Prob.* $< 0,05$.

Variabel Pendidikan (X1)

Uji *t* menunjukkan *t-statistic* $-2,733609$ dan *p-value* 0,0079 untuk variabel pendidikan (X1). Nilai probabilitas $< 0,05$ menunjukkan bahwa pendidikan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sehingga peningkatan pendidikan membantu menurunkan kemiskinan di Jawa Timur.

Variabel Upah Minimum (X2)

Uji *t* menunjukkan *t-statistic* $-0,091662$ dan *p-value* $0,9272$ untuk variabel upah minimum (X2). Karena *p-value* $> 0,05$, variabel ini secara parsial tidak signifikan memengaruhi tingkat kemiskinan, sehingga perubahan upah minimum belum berdampak langsung pada kemiskinan selama periode penelitian.

Variabel Pengangguran (X3)

Uji *t* menunjukkan *t-statistic* $5,060904$ dan *p-value* $0,0000$ untuk variabel pengangguran (X3). Nilai probabilitas $< 0,05$ menandakan pengaruh positif dan signifikan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan, sehingga peningkatan pengangguran meningkatkan kemiskinan di Jawa Timur.

Uji F

Pengujian simultan menggunakan FEM menghasilkan *F-statistic* sebesar $6697,093$ dengan *p-value* $0,0000$, $< \alpha = 5\%$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_1 diterima, menandakan bahwa pendidikan (X1), upah minimum (X2), dan pengangguran (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur pada 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, upah minimum, dan pengangguran secara bersama-sama dapat menjelaskan variasi tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Namun, dengan mengkombinasikan tiga variabel independen tersebut secara bersamaan, sehingga model yang digunakan menjadi dapat diterima dan relevan untuk menjelaskan permasalahan kemiskinan yang ada di Jawa Timur.

Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R²)

Berdasarkan hasil estimasi Fixed Effect Model (FEM), diperoleh nilai R-squared sebesar $0,997319$ dan Adjusted R-squared sebesar $0,995830$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam menjelaskan variasi tingkat kemiskinan pada 38 kabupaten/kota di Jawa Timur selama periode 2022–2024. Namun, tingginya nilai koefisien determinasi dalam model FEM perlu diinterpretasikan secara hati-hati karena model turut memperhitungkan efek tetap masing-masing kabupaten/kota yang dapat menangkap karakteristik khusus dan perbedaan antarwilayah yang relatif tidak berubah selama periode penelitian. Oleh karena itu, nilai Adjusted R-squared sebesar $0,995830$ tidak dapat diartikan bahwa pendidikan, upah minimum, dan pengangguran secara individual menjelaskan 99,58% variasi kemiskinan, maupun dijadikan dasar tunggal untuk menyatakan bahwa model sangat valid. Kelayakan model dalam penelitian ini perlu dilihat secara keseluruhan berdasarkan pemilihan model FEM dan hasil pengujian statistik yang telah dilakukan.

Uji Hipotesis

Hipotesis pertama menguji pengaruh parsial pendidikan (X1) terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Timur. Dengan *p-value* $0,0079 < 0,05$, H_0 ditolak, menandakan pengaruh negatif dan signifikan pendidikan terhadap kemiskinan.

Hipotesis kedua menguji pengaruh parsial upah minimum (X2) terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Timur. *P-value* $0,9272 > 0,05$ menunjukkan H_0 diterima, menandakan tidak adanya pengaruh signifikan dari upah minimum terhadap kemiskinan.

Hipotesis ketiga mengasumsikan adanya pengaruh parsial Pengangguran (X3) terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. Dengan nilai

probabilitas uji t sebesar 0,0000 ($< 0,05$), hipotesis nol ditolak, mengindikasikan bahwa pengangguran secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan.

Hipotesis keempat mengusulkan bahwa Pendidikan (X1), Upah Minimum (X2), dan Pengangguran (X3) secara bersama-sama memengaruhi kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Timur. Uji F menghasilkan p-value 0,0000 ($< 0,05$), sehingga hipotesis nol ditolak, menegaskan pengaruh signifikan simultan dari ketiga variabel.

Pengaruh Pendidikan terhadap Kemiskinan

Analisis regresi panel mengindikasikan bahwa pendidikan (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Jawa Timur (2022-2024). Koefisien -0,95285 menunjukkan bahwa tambahan satu tahun pendidikan rata-rata menurunkan tingkat kemiskinan sekitar 0,95 persen, dengan variabel lain tetap. Hal ini menegaskan peran penting pendidikan dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menekan kemiskinan.

Temuan ini selaras dengan Alfin dan Boedirochminarni (2024), yang menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Jawa Timur, meskipun pengaruh upah minimum lebih lemah. Nabibah dan Hanifa (2023) juga menegaskan bahwa peningkatan pendidikan secara nyata menurunkan jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, pendidikan dapat diposisikan sebagai determinan utama dalam kebijakan pengentasan kemiskinan daerah.

Peningkatan jenjang pendidikan berdampak pada produktivitas, kompetensi, dan peluang kerja yang lebih luas, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan individu dibanding individu berpendidikan rendah atau yang kurang produktif.

Oleh karena itu, dalam konteks Provinsi Jawa Timur, pendidikan memiliki peran yang strategis dalam upaya penurunan kemiskinan. Peningkatan rata-rata lama sekolah yang berkelanjutan terbukti mampu menekan tingkat kemiskinan, sehingga kebijakan publik yang menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan serta pemerataan akses pendidikan antarwilayah merupakan prasyarat penting untuk mencapai pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Pencapaian pendidikan terkait dampak kemiskinan di Jawa Timur telah menunjukkan dampak negatif dan signifikan secara statistik. Namun, pendidikan dalam konteks Provinsi Jawa Timur juga bertindak sebagai faktor struktural yang memengaruhi dinamika kemiskinan di daerah tersebut. Variasi dalam pencapaian pendidikan di antara sub-wilayah Jawa Timur mencerminkan disparitas dalam kualitas sumber daya manusia yang berdampak langsung pada variasi dalam peluang kerja dan akibatnya tingkat pendapatan penduduk. Sub-wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang lebih rendah umumnya kurang mampu mempekerjakan tenaga kerja mereka ke dalam sektor-sektor produktif ekonomi dan akibatnya penduduk dianggap rentan secara ekonomi terhadap kemiskinan. Situasi ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan penentu tingkat kesejahteraan individu tetapi juga memengaruhi struktur-struktur ekonomi yang lebih luas di daerah tersebut.

Dalam struktur ekonomi Provinsi Jawa Timur, sektor-sektor ekonomi yang memberikan kontribusi paling signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, seperti di industri manufaktur, perdagangan, dan jasa, umumnya memerlukan tingkat

pendidikan dan keterampilan tertentu dari tenaga kerja mereka. Ketika tingkat pendidikan dalam populasi rendah, tenaga kerja lebih terserap ke dalam sektor informal dan sektor-sektor dengan produktivitas rendah yang tidak stabil secara ekonomi. Situasi ini berkontribusi pada peningkatan kerentanan ekonomi rumah tangga dan meningkatkan risiko kemiskinan dalam populasi. Oleh karena itu, kebutuhan akan pendidikan adalah yang terpenting agar populasi dapat berpartisipasi dalam proses produktif pembangunan ekonomi.

Hubungan antara pendidikan dan kemiskinan juga terkait dengan variabel pengangguran dan upah minimum, yang dianalisis dalam penelitian ini. Pendidikan yang rendah meningkatkan kemungkinan individu menganggur atau bekerja di sektor informal, sehingga membatasi efektivitas kebijakan upah minimum dalam mengurangi kemiskinan. Hal ini karena mayoritas orang miskin berada di sektor yang tidak sepenuhnya tercakup oleh regulasi upah formal. Oleh karena itu, pendidikan berfungsi sebagai faktor dasar yang menentukan sejauh mana kebijakan ketenagakerjaan dapat memiliki dampak nyata dalam mengurangi kemiskinan.

Temuan ini konsisten dengan Teori Vicious Circle of Poverty menurut Nurkse R (1953) yang menjelaskan bahwa pendidikan yang buruk mengarah pada produktivitas dan pendapatan yang rendah dan, sebagai hasilnya, membatasi kemampuan rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan berinvestasi dalam pendidikan generasi berikutnya. Siklus ini kemungkinan akan berlanjut tanpa intervensi kebijakan yang memadai. Dalam kerangka periode pemulihan ekonomi pasca 2022-2024, kondisi ini semakin relevan karena pertumbuhan ekonomi yang tidak diimbangi dengan perbaikan dalam pendidikan kemungkinan akan mengakibatkan pertumbuhan yang tidak inklusif.

Hasil penelitian ini menegaskan jika pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam pengentasan kemiskinan di Jawa Timur. Peningkatan rata-rata lama sekolah seharusnya diikuti dengan perbaikan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar untuk memperbaiki daya saing pekerja dan menstabilkan pendapatan rumah tangga. Selain itu, pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah juga penting untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Dengan begitu, pendidikan akan menjadi instrumen yang paling strategis untuk memutuskan siklus kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Jawa Timur.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Kemiskinan

Hasil estimasi regresi data panel menunjukkan bahwa upah minimum (X_2) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur periode 2022–2024. Nilai probabilitas yang melebihi taraf signifikansi 5 persen mengindikasikan bahwa perubahan upah minimum belum mampu menurunkan kemiskinan secara nyata, dengan asumsi variabel lain konstan.

Hasil ini selaras dengan *Competitive Labor Market Theory* menurut Hohberg, M., & Lay, J. (2015) yang menyatakan bahwa penetapan upah dipengaruhi oleh keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika upah minimum melebihi tingkat keseimbangan, pasar tenaga kerja cenderung menyesuaikan

melalui pengurangan penyerapan tenaga kerja atau peralihan ke sektor informal, sehingga dampaknya terhadap kesejahteraan kelompok miskin menjadi terbatas. Dalam konteks Jawa Timur, dominasi sektor informal menyebabkan kebijakan upah minimum tidak sepenuhnya menjangkau kelompok penduduk miskin. Mayoritas rumah tangga miskin memperoleh penghasilan dari sektor informal yang tidak tunduk pada regulasi upah, sehingga kenaikan upah minimum sektor formal tidak secara langsung meningkatkan pendapatan mereka.

Selain menunjukkan pengaruh negatif yang tidak signifikan secara statistik, temuan mengenai upah minimum dalam penelitian ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara kebijakan ketenagakerjaan dan kemiskinan di tingkat daerah. Ketidak signifikan statistik dari efek upah minimum terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum nominal belum diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Ini menunjukkan bahwa ada batasan struktural dalam pelaksanaan kebijakan upah minimum, terutama dalam hal menjangkau rumah tangga miskin di Jawa Timur.

Secara empiris, efektivitas kebijakan upah minimum sangat bergantung pada struktur pasar tenaga kerja di suatu daerah. Jawa Timur memiliki pasar tenaga kerja informal yang ditandai oleh usaha mikro dan kecil, produktivitas rendah, menyerap tenaga kerja, dan sektor informal. Dalam situasi ini, sebagian besar tenaga kerja berada di luar hubungan kerja formal yang dikenakan pada regulasi upah minimum. Akibatnya, kenaikan upah minimum lebih berdampak pada pekerja formal yang sudah memiliki kesejahteraan lebih baik, sementara yang miskin tetap berada di luar jangkauan kebijakan. Ini menjelaskan mengapa belum ada penurunan signifikan dalam kemiskinan meskipun ada perubahan dalam upah minimum.

Selain itu, perbedaan dalam kapasitas fiskal dan struktur ekonomi di antara kabupaten/kota di Jawa Timur juga memengaruhi efektivitas kebijakan upah minimum. Wilayah dengan basis aktivitas industri dan ekonomi yang kuat relatif lebih mampu menyesuaikan diri dengan peningkatan upah minimum dibandingkan dengan wilayah yang memiliki ketergantungan tinggi pada sektor pertanian tradisional atau usaha mikro. Ketimpangan kapasitas ini mengakibatkan dampak kebijakan upah minimum terhadap kemiskinan tidak merata di seluruh wilayah, sehingga kontribusinya terhadap pengurangan kemiskinan agregat di provinsi tersebut relatif tidak signifikan.

Dari perspektif ekonomi, hasil ini sejalan dengan pandangan bahwa kemiskinan adalah fenomena multidimensi yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu instrumen kebijakan. Upah minimum melindungi pasar kerja, tetapi sejauh mana ia mengurangi kemiskinan sangat bergantung pada keterkaitannya dengan kebijakan lain, seperti meningkatkan pendidikan, meningkatkan pekerjaan formal, dan memperkuat sektor produktif. Tanpa sinergi semacam itu, kebijakan upah minimum berisiko hanya memberikan manfaat yang parsial dan terbatas.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan upah minimum di Provinsi Jawa Timur pada periode 2022–2024 belum menjadi faktor penentu utama dalam penurunan kemiskinan. Upah minimum perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ketenagakerjaan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Kombinasi antara kebijakan upah, peningkatan

produktivitas tenaga kerja, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, serta pemberdayaan sektor informal menjadi prasyarat penting agar kebijakan upah minimum dapat memberikan kontribusi yang lebih efektif terhadap pengurangan kemiskinan di Jawa Timur.

Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Analisis panel menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pengangguran (X3) terhadap kemiskinan di Jawa Timur (2022–2024), dengan koefisien 0,14156, yang menandakan bahwa peningkatan pengangguran berasosiasi dengan kenaikan tingkat kemiskinan, sementara variabel lain tetap.

Selaras dengan Teori Pengangguran Keynesian, bahwa pengangguran merupakan konsekuensi dari ketidakseimbangan ekonomi dalam permintaan kolektif, yang mengakibatkan ketidakseimbangan ekonomi yang menyebabkan penurunan produktivitas angkatan kerja. Peningkatan kemiskinan disebabkan oleh penurunan pendapatan rumah tangga dan peningkatan ikatan sosial.

Secara empiris, hasil kajian ini konsisten dengan temuan Ertanti dan Huda (2024) serta Sa'diyah dan Pimada (2024), yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dari pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Fakta ini menandakan bahwa penyerapan tenaga kerja yang lemah tetap menjadi masalah struktural dalam proses pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, signifikansi pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa masalah utama di Jawa Timur tidak hanya pada jumlah peluang kerja yang ada, namun pada kualitas dan keberlanjutan pekerjaan yang dihasilkan. Pekerjaan yang bersifat temporer, berupah rendah dan tanpa perlindungan sosial tidak akan pernah mampu mengevakuasi rumah tangga dari kemiskinan. Hal ini mengakibatkan sebagian dari mereka berada pada kondisi yang rentan secara ekonomi meskipun secara statistik mereka sudah tercatat bekerja.

Oleh karena itu, pengangguran dan kemiskinan berkaitan lebih kompleks dari sekadar masalah orang yang bekerja dan tidak bekerja. Selain itu, kondisi pengangguran yang tinggi juga berkorelasi dengan rendahnya kualitas dan daya saing tenaga kerja, terutama pada kelompok pekerja usia produktif yang belum pernah bekerja. Ketidakcocokan kondisi dunia usaha dan ketrampilan tenaga kerja meningkatkan peluang untuk menganggur dalam jangka waktu yang lama. Jenis pengangguran ini memiliki dampak yang lebih serius pada kemiskinan karena semakin lama seseorang menganggur, kemampuan ekonomi dan sosialnya akan semakin berkurang yang pada akhirnya meningkatkan risiko seseorang jatuh ke dalam kemiskinan secara kronis.

Dari perspektif pengembangan kawasan, temuan menunjukkan bahwa, tanpa penciptaan lapangan kerja yang inklusif, pertumbuhan ekonomi cenderung akan memperlebar kesenjangan dalam distribusi kekayaan. Kegiatan ekonomi yang hanya terfokus di sektor tertentu tanpa adanya lapangan kerja yang signifikan akan mengarah pada apa yang disebut sebagai pertumbuhan eksklusif. Akibatnya, manfaat pembangunan tidak dirasakan oleh segmen penduduk berpenghasilan rendah, dan dengan demikian kemiskinan tetap ada bahkan ketika ekonomi daerah berjalan baik.

Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan dalam studi ini juga mendukung pandangan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak berdiri sendiri dan perlu diintegrasikan dengan kebijakan ketenagakerjaan. Program bantuan sosial berisiko bersifat sementara dan mengabaikan masalah dasar, jika program tidak menciptakan peluang untuk pekerjaan produktif. Oleh karena itu, mengurangi tingkat pengangguran adalah kondisi penting untuk efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan di Jawa Timur.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa pengangguran berperan sebagai variabel kunci yang menjembatani dinamika pasar tenaga kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya pengurangan kemiskinan akan lebih berkelanjutan apabila diarahkan pada strategi peningkatan penyerapan tenaga kerja, penguatan kualitas pekerjaan, serta penciptaan struktur ekonomi daerah yang mampu menyediakan kesempatan kerja yang stabil dan produktif bagi seluruh masyarakat.

Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan

Temuan studi menunjukkan bahwa variabel Pendidikan (X1), Upah Minimum (X2), dan Pengangguran (X3) secara bersamaan memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur selama periode 2022-2024. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan ditentukan oleh hubungan antara variabel ekonomi dan sosial, sehingga tidak dapat dijelaskan secara parsial. Signifikansi pengujian simultan menunjukkan adanya interaksi struktural yang secara bersamaan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dari pandangan ekonomi, temuan ini memperkuat konsep bahwa kemiskinan merupakan fenomena kompleks dengan karakteristik multidimensional. Tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan terbatasnya kapasitas pasar tenaga kerja dalam menyerap pekerja berdampak langsung pada berkurangnya pendapatan rumah tangga. Sebaliknya, kualitas modal manusia dibatasi oleh rendahnya tingkat pendidikan, yang menyebabkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja tetap rendah. Sementara itu, karena kebijakan upah minimum belum sepenuhnya mencakup sektor informal, peningkatan pendapatan belum dirasakan secara merata oleh kelompok berpendapatan rendah.

Lebih lanjut, meskipun dalam pengujian parsial upah minimum belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, temuan pengujian simultan mengindikasikan bahwa variabel ini tetap memiliki peran penting dalam struktur pembentukan kemiskinan di Jawa Timur. Ketidaksignifikanan secara parsial tidak serta-merta meniadakan peran upah minimum, melainkan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan upah sangat bergantung pada kondisi pasar tenaga kerja dan karakteristik tenaga kerja yang ada. Dengan kata lain, dampak upah minimum terhadap kemiskinan tidak berdiri sendiri, tetapi bekerja melalui interaksi dengan tingkat pendidikan dan tingkat pengangguran.

Dalam konteks struktur ketenagakerjaan Jawa Timur, peran upah minimum menjadi terbatas karena dominasi sektor informal yang cukup besar. Sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor yang tidak sepenuhnya tunduk pada regulasi upah minimum, seperti usaha mikro, pertanian skala kecil, dan pekerjaan informal perkotaan. Kondisi ini menyebabkan peningkatan upah minimum di sektor formal tidak secara langsung meningkatkan pendapatan kelompok miskin.

Namun demikian, upah minimum tetap berfungsi sebagai acuan standar kesejahteraan kerja dan berpotensi memengaruhi struktur upah secara tidak langsung, terutama di wilayah dengan proporsi sektor formal yang lebih besar. Selain itu, efektivitas upah minimum dalam menekan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Tenaga kerja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung terkonsentrasi pada pekerjaan berproduktivitas rendah dan berupah minimum atau bahkan di bawah standar. Dalam kondisi ini, kenaikan upah minimum tanpa diiringi peningkatan keterampilan dan produktivitas berpotensi mendorong pelaku usaha untuk mengurangi penyerapan tenaga kerja atau beralih ke sistem kerja informal. Mekanisme ini memperkuat hubungan antara upah minimum dan pengangguran, yang pada akhirnya dapat menghambat upaya pengurangan kemiskinan.

Interaksi antara upah minimum dan pengangguran juga menunjukkan bahwa kebijakan upah yang tidak selaras dengan kemampuan ekonomi daerah berpotensi menimbulkan efek penyesuaian pasar tenaga kerja. Di wilayah dengan produktivitas rendah, kenaikan upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi dan mendorong pengusaha melakukan efisiensi tenaga kerja. Akibatnya, sebagian tenaga kerja kehilangan pekerjaan atau masuk ke sektor informal, yang justru meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga. Hal ini menjelaskan mengapa pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan tidak selalu bersifat langsung dan signifikan, terutama dalam jangka pendek.

Dalam kerangka Teori *Vicious Circle of Poverty* menurut Nurkse R (1953) peran upah minimum dapat diposisikan sebagai salah satu faktor yang memengaruhi distribusi pendapatan, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh kualitas modal manusia dan struktur kesempatan kerja. Pendapatan yang rendah membatasi akses pendidikan dan pelatihan, sehingga produktivitas tenaga kerja tetap rendah dan kesempatan memperoleh pekerjaan dengan upah layak menjadi terbatas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan upah minimum tanpa dukungan kebijakan pendidikan dan penciptaan lapangan kerja produktif berisiko hanya memberikan dampak yang terbatas terhadap pengurangan kemiskinan.

Temuan simultan dalam penelitian ini memperkuat pandangan bahwa upah minimum lebih berperan sebagai bagian dari ekosistem kebijakan ketenagakerjaan daripada sebagai instrumen tunggal pengentasan kemiskinan. Upah minimum baru akan efektif dalam menekan kemiskinan apabila didukung oleh peningkatan kualitas pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja produktif serta perluasan kesempatan kerja formal yang mampu menyerap angkatan kerja secara berkelanjutan. Tanpa sinergi tersebut, kebijakan upah minimum cenderung hanya berdampak pada kelompok pekerja formal tertentu dan belum menyentuh akar permasalahan kemiskinan.

Selain itu, perbedaan karakteristik ekonomi antar kabupaten/kota di Jawa Timur turut memengaruhi efektivitas kebijakan upah minimum. Wilayah dengan basis industri dan sektor formal yang kuat cenderung lebih responsif terhadap kebijakan upah minimum dibandingkan wilayah yang masih bergantung pada sektor primer dan informal. Kondisi ini menegaskan bahwa kebijakan upah minimum perlu mempertimbangkan heterogenitas wilayah agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diharapkan terhadap kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dalam konteks hasil pengujian simultan, upah minimum tetap memiliki relevansi dalam menjelaskan dinamika kemiskinan di Jawa Timur, meskipun perannya bersifat tidak langsung. Kebijakan upah minimum perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi terpadu yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan, penguatan produktivitas tenaga kerja, dan penciptaan lapangan kerja formal. Pendekatan terpadu ini diharapkan mampu memutus mata rantai kemiskinan secara struktural dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di seluruh wilayah Jawa Timur.

KESIMPULAN

Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga hipotesis diterima, yang menunjukkan bahwa peningkatan rata-rata lama sekolah dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan peluang kerja sehingga membantu menurunkan kemiskinan di Jawa Timur. Upah minimum berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan, sehingga hipotesis ditolak, yang menunjukkan bahwa kebijakan upah minimum belum sepenuhnya mampu menekan kemiskinan, terutama karena sebagian masyarakat miskin bekerja di sektor informal. Sementara itu, pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, sehingga hipotesis diterima, karena meningkatnya pengangguran dapat mengurangi pendapatan rumah tangga dan meningkatkan kerentanan ekonomi. Secara simultan, pendidikan, upah minimum, dan pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada periode pengamatan yang relatif singkat, yaitu 2022–2024, serta variabel yang digunakan masih terbatas pada pendidikan, upah minimum, dan pengangguran, sehingga belum mencakup faktor lain yang juga dapat memengaruhi kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang, menambahkan variabel seperti pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, investasi, dan perlindungan sosial, serta mempertimbangkan perbedaan karakteristik pekerja formal dan informal agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan di Jawa Timur.

REFERENSI

- Aleffin, G. S., & Imaningsih, N. (2024). Pengaruh upah minimum, TPT, dependency ratio, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Jawa Timur. *JAMBURA: Economic Education Journal*.
- Badan Pusat Statistik . (2019). *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro di Indonesia Tahun 2019*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. From <https://www.bps.go.id/id/publication/2023/06/30/0c9>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. (2023). *Data Kemiskinan Jawa Timur*. From <https://jatim.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#su>
- Bank Dunia. (2023). *Poverty and Shared Prosperity 2023: Ending Poverty on a Livable Planet*. From World Bank Group: <https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity>

- Becker, G. S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education*. Original Work.
- Choirur, M., dkk. (2021). Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains*.
- Ertanti Dwi Ardian & Syamsul Huda. (2025). The Effect of Open Unemployment Rate, Human Development Index, and Minimum Wage on the Poverty Rate in East Java Province. *International Journal of Business and Applied Economics (IJBAE)*, Vol. 4 No. 5, 2697-2708.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics (5th ed.)*. New York: McGraw-Hill Irwin.
- Hohberg, M., & Lay, J. (2015). The impact of minimum wages on informal and formal labor market outcomes: Evidence from Indonesia. *IZA Journal of Labor & Development*, 4(14), 1–27. <https://doi.org/10.1186/s40175-015-0036-4>
- Kadir, K. (2019). Returns to Education and Wages Distribution in Indonesia. *MPRA Paper No. 94929*.
- Nabibah, E. T., & Hanifa, N. (2022). Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pendidikan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. *INDEPENDENT: Journal of Economics*, 2 (3), 1-13.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford: Basil Blackwell.
- Pradipta, R. (2020). Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Provinsi Banten. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Putri, T. L., et al. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ecosains: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembangunan*.
- Sa'diyah, Nabilah & Laila M. Pimada. (2024). Socioeconomic Dynamics and Poverty Rate in East Java: A Panel Regression Investigation. *Journal of Developing Economies*, 9(1), 107–127.
- Sari, Y. A. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 10(2).
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 5(4), 340–350.
- Utami, I. T., dkk. (2022). Analisis Pengaruh Upah Minimum, Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan di Beberapa Provinsi. *Jurnal Economics and Business*.
- Widiastuti, A. (2023). Pengaruh Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Jawa Timur Tahun 2014–2023. *Jurnal Ekonomi*.
- Yasir, H. (2024). The Relationship Between Education Inequality, Poverty, and Economic Growth in Sumatra (2004–2022). *INFEB Journal*.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Output Statistik Deskriptif Variabel Upah Minimum (X2)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Upah Minimum	114	1922123	4725479	2668773	803424.5
Valid N (listwise)	114				

Sumber : Data diolah Eviews 13 (2026)

Lampiran 2. Output Statistik Deskriptif Variabel Pengangguran (X3)

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengangguran	114	1.360.000	8.800.000	4.687.965	1.528.063
Valid N (listwise)	114				

Sumber : Data diolah Eviews 13 (2026)

Lampiran 3. Output hasil Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	212.235.473	(37,72)	0
Cross-section Chi-square	531.221.498	37	0

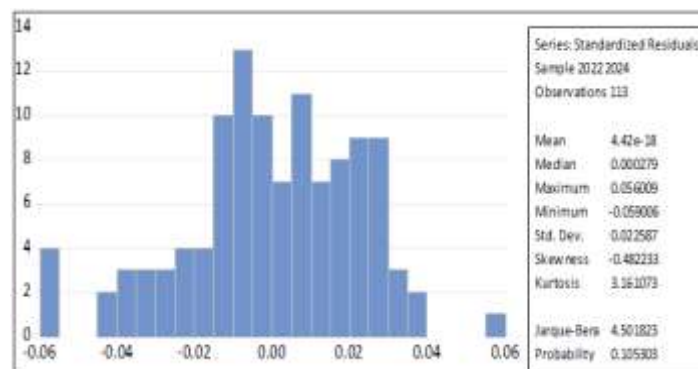
Sumber : Data diolah Eviews 13 (2026)

Lampiran 4. Output hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f	Prob.
Cross-section random	13.079.212	3	0.0045

Sumber : Data diolah Eviews 13 (2026)

Lampiran 5. Output hasil Uji Normalitas



Sumber : Data diolah Eviews 13 (2026)

Lampiran 6. Output hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1	0.416057977	0.4982118

X2	0.41605798	1	0.40682213
X3	0.4982118	0.406822132	1

Sumber : Data diolah Eviews 13 (2026)

Lampiran 7. Output hasil Uji Heterokedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.659.268	3.980.457	1.421.763	0.1594
X1	-2.524.551	1.169.243	-0.21591	0.8297
X2	3.806.930	3.271.522	1.163.657	0.2484
X3	0.889099	0.938277	0.947587	0.3465

Sumber : Data diolah Eviews 13 (2026)

Lampiran 8. Output hasil Uji Hipotesis

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.152.292	1.186.632	3.499.225	0.0008
X1	-0.95285	0.348568	-2.733.609	0.0079
X2	-0,00894	0.097529	-0.091.662	0.9272
X3	0.14156	0.0279	5.060.904	0
R-squared	0.997319			2.223.036
Adjusted R-squared	0.99583			0.43627
S.E. of regression	0.028171			-4.026.077
Prob(F-statistic)	0			

Sumber : Data diolah Eviews 13 (2026)